

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

2020

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.5 Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	16
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 dengan Tahun Lalu	19
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra.....	20
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.....	22
3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
3.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan ..	38
3.7 Realisasi Anggaran Per Sasaran	43
BAB VI PENUTUP	
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan.....	46
4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja.....	48
4.3 Strategi dan Pemecahan Masalah.....	48

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2020 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LAKIP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Diskominfo Kota Depok, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kerjanya.

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2020 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami berharap LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Depok, Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok



Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng

NIP. 19670124 198602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2020 yang melibatkan seluruh bidang/bagian di Diskominfo Kota Depok. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 telah ditetapkan lima sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfo Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B	BB	125	Melebihi Target
2	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	40%	60%	150	Melebihi Target
		Cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika	60%	70.96%	118	Melebihi Target
3	Meningkatnya layanan informasi public	Indeks keterbukaan informasi badan publik	Baik	Baik	100	Mencapai Target

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	6 jenis statistik	6 jenis statistik	100	Mencapai Target
5	Meningkatnya sistem keamanan komunikasi dan informatika	Persentase aplikasi yang diuji	60%	60%	100	Mencapai Target

Berdasarkan tabel di atas terdapat 5 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada Tahun 2020, terdapat 3 indikator dengan hasil realisasi mencapai target dan 3 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2020, total anggaran Diskominfo Kota Depok adalah sebesar Rp. 31.325.979.567,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 9.635.257.767,- dan belanja langsung Rp. 21.690.721.800,- Realisasi belanja total sebesar 86.33% atau sebesar Rp. 27.045.887.562,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 7.389.976.941,- (76.70%) dan belanja langsung Rp. 19.655.910.621,- (90.62%).

Depok, Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok

Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng

NIP. 19670124 198602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan *good governance* adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus pembangunan pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, *private sector* dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bahwa Dinas merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Diskominfo Kota Depok, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kota Depok Tahun Anggaran 2020. Laporan akuntabilitas ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Tahun 2020.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Diskominfo Kota Depok dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Depok di Tahun Anggaran 2020. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Diskominfo Kota Depok pada Tahun Anggaran 2020;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Diskominfo Kota Depok pada Tahun Anggaran 2020, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Diskominfo Kota Depok di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kota Depok Tahun 2020 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- g. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
- i. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
- j. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020
- k. Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan tugas perbantuan.

Adapun fungsi dari Diskominfo Kota Depok adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Diskominfo Kota Depok dipimpin oleh satu orang Kepala Dinas, susunan organisasi Diskominfo Kota Depok sebagai berikut :

Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi;
- b. Seksi Komunikasi Publik.

3. Bidang Aplikasi Informatika membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

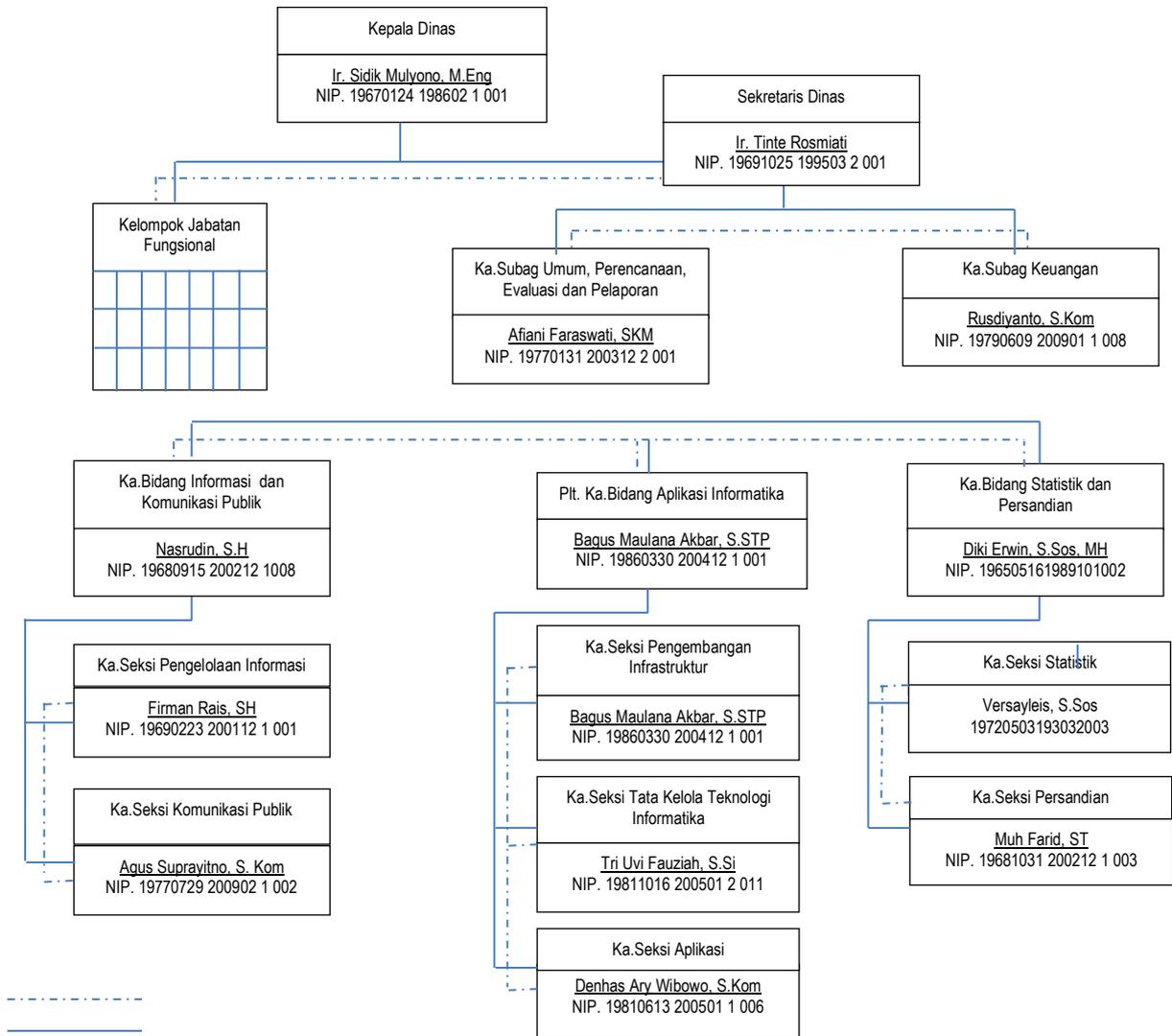
- a. Seksi Pengembangan Infrastruktur;
- b. Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika;
- c. Seksi Aplikasi.

4. Bidang Statistik dan Persandian membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Statistik;
- b. Seksi Persandiaan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Diskominfo Kota Depok secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Diagram Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kota Depok Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Diskominfo Kota Depok Tahun 2020.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini menguraikan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan tentang akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi Pemerintah Kota Depok Tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Tahun 2006-2025 yaitu Depok **Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius dan Berwawasan Lingkungan.**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok di atas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta

relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi keempat : Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk Karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berlaku efektif pada Tahun 2019 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok melakukan perubahan Renstra dan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dalam pencapaian Misi Pertama, yaitu : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan**, dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Depok maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai RPJMD Kota Depok dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, yaitu :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kapasitas manajemen kinerja Diskominfo	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Menciptakan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Pengelolaan sarana/prasarana, SDM, keuangan serta administrasi perkantoran Diskominfo
2	Meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Menggunakan teknologi informasi pada berbagai aspek layanan pemerintah kepada masyarakat	Peningkatan penggunaan dan pengelolaan berbagai aplikasi TI pada layanan pemerintah
		Meningkatnya layanan informasi publik	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media	Optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Memberikan tanggapan pengaduan yang cepat, tepat dan akurat	Pemberdayaan peran PPID dan operator dalam menghimpun dan mengelola data
	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Menyediakan data-data statistik sectoral	Peningkatan ketersediaan data statistik sectoral
	Meningkatnya sistem keamanan komunikasi dan informatika	Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dipergunakan	Pengujian keamanan aplikasi yang dipergunakan

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Nomor : 900/01/I/Diskominfo/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B
Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	40%
	Cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika	60%
Meningkatnya layanan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi badan public	Baik
Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	6 jenis statistik
Meningkatnya sistem keamanan komunikasi dan informatika	Persentase aplikasi yang diuji	60%

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada rencana strategis Tahun 2011-2016 Diskominfo Kota Depok dan sumber daya anggaran yang ada, Diskominfo Kota Depok telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2020. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Diskominfo Kota Depok dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2020 :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B
2	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	40%
		Cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika	60%
3	Meningkatnya layanan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi badan public	Baik
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	6 jenis statistik
5	Meningkatnya sistem keamanan komunikasi dan informatika	Persentase aplikasi yang diuji	60%

Total Anggaran Diskominfo Kota Depok pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 21.690.721.800,00 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah). Dengan rincian dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan administrasi perkantoran	Rp. 649.791.000,-	Mendukung sasaran strategis pertama
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 155.125.000,-	Mendukung sasaran strategis pertama
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Rp. 0,-	Mendukung sasaran strategis pertama (refocusing anggaran guna penanggulangan dampak pandemi Covid19)
4	Peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 24.999.800,-	Mendukung sasaran strategis pertama
5	Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika	Rp. 14.371.790.800,-	Mendukung sasaran strategis kedua dan kelima
6	Pengembangan keterbukaan informasi dan komunikasi public	Rp. 4.897.097.300,-	Mendukung sasaran strategis ketiga
7	Peningkatan kualitas perencanaan	Rp. 645.296.900,-	Mendukung sasaran strategis pertama
8	Pengembangan data dan informasi statistik sektoral	Rp. 946.621.000,-	Mendukung sasaran strategis keempat
Jumlah Anggaran		Rp. 21.690.721.800,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Diskominfo Kota Depok sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Depok melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2020 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama Tahun 2020. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Baik	
2	75.00 - 89.99	Baik	
3	65.00 - 74.99	Cukup	
4	50.00 - 64.99	Kurang	
5	0 – 49.99	Sangat Kurang	

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2020

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Nomor: 900/01/I/Diskominfo/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan						
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B	BB	125	Melebihi Target
2	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	40%	60%	150	Melebihi Target
		Cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika	60%	70.96%	118	Melebihi Target
3	Meningkatnya layanan informasi public	Indeks keterbukaan informasi badan publik	Baik	Baik	100	Mencapai Target
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	6 jenis statistik	6 jenis statistik	100	Mencapai Target

5	Meningkatnya system keamanan komunikasi dan informatika	Persentase aplikasi yang diuji	60%	60%	100	Mencapai Target
---	---	--------------------------------	-----	-----	-----	-----------------

Analisis Perbandingan

Berdasarkan Tabel 3.2. terdapat 5 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada Tahun 2020, dari 6 indikator tersebut terdapat 3 indikator dengan hasil realisasi mencapai target dan 3 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	REALISASI 2020	KETERANGAN
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B	BB	
2	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	50%	60%	
		Cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika	45.6%	70.96%	

3	Meningkatnya layanan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi badan publik	Baik	Baik	
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	5 Jenis Statistik	6 Jenis Statistik	
5	Meningkatnya sistem keamanan komunikasi dan informatika	Persentase aplikasi yang diuji	40%	60%	

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan dan mencapai target, bahkan sebagian besar melebihi target yang telah ditetapkan.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan RPJMD yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target RPJMD Kota Depok

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET RPJMD	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan							
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B	BB	125	B	125
2	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	40%	60%	150	40%	150
		Cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika	60%	70.96%	118	60%	118
3	Meningkatnya layanan informasi public	Indeks keterbukaan informasi badan publik	Baik	Baik	100	Baik	100
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	6 jenis statistik	6 jenis statistik	100	6 jenis statistik	100

5	Meningkatnya sistem keamanan komunikasi dan informatika	Persentase aplikasi yang diuji	60%	60%	100	60%	100
---	---	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Analisis Perbandingan

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021, dari 5 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada Tahun 2020, terdapat 3 indikator kinerja dengan hasil realisasi mencapai target dan 3 indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok melaksanakan 3 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dengan 8 program dan 37 kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2016-2021. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1**, yaitu : **Meningkatkan Kapasitas Manajemen Kinerja Diskominfo** dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP Diskominfo B**.

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan Kapasitas Manajemen Kinerja Diskominfo

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	INTERPRETASI
1	Nilai SAKIP Diskominfo	B	BB	125	Melebihi Target

Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Pada saat ini, nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok mendapat predikat BB untuk penilaian SAKIP tahun 2019 yang penilaian dilakukan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Diskominfo Kota Depok yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja, maka Diskominfo melakukan beberapa upaya perbaikan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut yaitu :

- Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dan indikator sasaran dokumen Renstra secara berkala;
- Menyusun SOP monitoring dan capaian kinerja;
- Melakukan pelaporan capaian kinerja secara rutin dengan selalu memperbaharui penginputan dalam E-Sakip dan Siep serta melaporkan capaian kinerja triwulanan kepada Bappeda Kota Depok.
- Memberikan *reward* dan *punishment* atas pencapaian target kinerja dan keuangan.

Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui berbagai program, yaitu :

1. Program Peningkatan administrasi perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan;
4. Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

b. Sasaran 2, yaitu : Meningkatnya penggunaan aplikasi TI pada layanan pemerintah dengan Indikator kinerja sasaran Cakupan layanan E-Government yang terintegrasi sebesar 40% dan Cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika sebesar 60%

Pada sasaran strategis ini, terdapat dua indikator kinerja yaitu cakupan layanan e-government yang terintegrasi dengan capaian sebesar 150% dan cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika dengan capaian sebesar 118% kedua indikator tersebut melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.6.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Penggunaan Aplikasi TI pada Layanan Pemerintah

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	INTERPRETASI
1	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	40%	60%	150	Melebihi Target
2	Cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika	60%	70.96%	118	Melebihi Target

Analisis penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Cakupan layanan e-government yang terintegrasi dapat mencapai target yang diharapkan karena adanya dukungan dari berbagai pihak dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait. Pada Tahun 2020 telah dilakukan beberapa inovasi untuk mencapai indikator sasaran ini yaitu mengembangkan Depok Single Windows dan pengembangan Data Warehouse untuk :

- Cluster CRM (*Citizenship Relationship Management*) : Database SIGAP dan Single Contact
- Cluster Kesehatan : Database RSUD, SIBIMA (Ibu dan Anak), SIPkeling (Kesehatan Lingkungan), Sistem Tenaga Medis.
- Cluster Kependudukan : Database *Summary Agregat* Kependudukan

Sedangkan untuk indikator kinerja cakupan infrastruktur teknologi informatika terdapat tiga komponen yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerjanya yaitu jaringan internet, internet publik dan CCTV. Untuk jaringan internet sampai dengan Tahun 2020 terdapat 3 koneksi internet yaitu Link 1 : 300 Mbps Internasional dan 300 Mbps Domestik, Link 2 : 220 Mbps Internasional dan 300 Mbps Domestik, jaringan fiber optik 3 : 300 Mbps Internasional dan 300 Mbps Domestik. Seluruh perangkat daerah di Kota Depok, kelurahan dan puskesmas telah terhubung dengan jaringan fiber optik.

Internet Publik saat ini telah terdapat layanan *free wifi* untuk gedung pemerintah sebanyak 258 titik dan 134 titik di area publik. Dan untuk memfasilitasi Pembelajaran Jarak Jauh di Kota Depok, telah terpasang 1103 titik wifi di setiap wilayah di 11 kecamatan di kota Depok, sedangkan untuk CCTV sampai dengan saat ini telah terpasang 32 titik cctv dan sensor (IOT).

Untuk mencapai hasil tersebut sasaran ini didukung oleh program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika yang terdiri dari 8 kegiatan, antara lain:

1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi
2. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi
3. Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City
4. Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery (DRC)

5. Penyediaan Layanan Internet
 6. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan
 7. Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok
 8. Pengembangan Data Warehouse
- c. **Sasaran 3**, yaitu : **Meningkatnya layanan informasi publik** dengan Indikator kinerja sasaran **Indeks Keterbukaan Badan Publik dengan nilai Baik**.
Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini tercapai, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Layanan Informasi Publik

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	INTERPRETASI
1	Indeks Keterbukaan Badan Publik	Baik	Baik	100	Mencapai Target

Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya layanan informasi public karena didukung oleh berbagai layanan yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika seperti layanan pengaduan Call Center 112, Aplikasi SIGAP dan membangun/membuat berbagai media informasi seperti media cetak, media elektronik (web site, media on line, dsb), talk show, siaran melalui televisi dan radio. Selain hal tersebut Diskominfo juga memfasilitasi pembangunan web site di semua Perangkat Daerah, sehingga semua Perangkat Daerah dapat mengisi/melaporkan berbagai aktivitas program/kegiatan di lingkungannya masing-masing. Disamping itu Diskominfo Kota Depok telah memberdayakan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ada di setiap perangkat daerah untuk ikut aktif dalam penanganan pengaduan dan permohonan informasi publik.

Untuk mendorong capaian kinerja sasaran tersebut dilakukan melalui Program Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan 8 kegiatan, yaitu:

1. Diseminasi informasi program pembangunan Kota Depok
 2. Layanan siaran melalui media elektronik
 3. Kemitraan dengan media massa
 4. Layanan M-CAP (Mobile Community Acces Point / Mobile Internet)
 5. Layanan Informasi Publik
 6. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik
 7. Pelayanan Pengaduan Emergency Call 112
 8. Penataan Radio Komunikasi
- d. Sasaran 4, yaitu : **Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik** dengan Indikator kinerja sasaran **Jumlah Jenis Informasi Statistik yang Dikelola sebanyak 6 jenis statistik**
- Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini tercapai, seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.8.
**Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya
Pengelolaan Data Statistik**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	INTERPRETASI
1	Jumlah Jenis Informasi Statistik yang Dikelola	6 jenis statistik	6 jenis statistik	100	Mencapai Target

Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja sasaran ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Depok dalam hal ini melalui Diskominfo dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). 6 jenis statistik yang disediakan oleh Diskominfo Kota Depok adalah data statistik sektoral dalam bidang ekonomi, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, pertanian dan pendidikan.

Untuk mendorong capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral dengan 5 kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Buku Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka
2. Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kota Depok
3. Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok
4. Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan
5. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

- e. Sasaran 5, yaitu : **Meningkatnya Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika** dengan indikator kinerja sasaran **Persentase Aplikasi yang diuji sebesar 60%**
Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini tercapai, seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.9.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	INTERPRETASI
1	Persentase Aplikasi yang di uji	60%	60%	100	Mencapai Target

Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Salah satu keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Depok dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Setiap tahun Diskominfo Kota Depok menargetkan 7 aplikasi utama yang diuji dari total perhitungan awal terdapat 28 aplikasi utama yang akan diuji. Diskominfo telah melakukan berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan keamanan informasi kepada seluruh stakeholder, selain itu pada Tahun 2019 telah dilakukan identifikasi ISO 27001. Pengujian yang dilakukan saat ini dirasa belum maksimal karena setiap tahunnya teknologi informasi berkembang dengan cepat oleh karenanya dibutuhkan dukungan anggaran dan ketersediaan SDM yang kompeten di bidang keamanan informasi.

Untuk mendorong capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika dengan 1 kegiatan, yaitu Pengelolaan Persandian

3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Kota Depok khususnya pada Diskominfo Kota Depok sangat menjadi prioritas Wali Kota Depok dalam mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok yang didukung oleh Program Prioritas didalamnya. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Dengan adanya pandemi covid 19 di seluruh dunia termasuk Indonesia, maka pada Tahun 2020 Diskominfo Kota Depok melakukan refocusing anggaran dan perubahan target kinerja kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Depok dalam rangka efisiensi penganggaran di Tahun 2020, yaitu :

- Melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Renstra dan PK;

- Secara bertahap melakukan integrasi system aplikasi yang sudah terbangun di perangkat daerah. Apabila ada perangkat daerah yang akan membangun aplikasi baru harus mendapatkan rekomendasi dari Diskominfo sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Electronic Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
- Bekerjasama dengan provider yang dapat menyediakan jaringan fiber optik yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meminimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan fiber optik.

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Diskominfo Kota Depok selama Tahun 2020 dapat diuraikan pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	649.791.000	621.312.323	95.62	
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	65 jenis	65 jenis	100%	133.413.000	127.829.600	95.81	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	8 jenis	8 jenis	100%	65.077.000	57.877.500	88.94	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	8 jenis	100%	7.212.000	7.200.000	99.83	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	16 jenis	16 jenis	100%	16.486.000	15.950.000	96.75	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis makanan dan minuman	5 jenis	5 jenis	100%	188.016.000	182.634.600	97.14	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah apartur mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	138 OH	138 OH	100%	239.587.000	229.820.623	95.92	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	155.125.000	148.318.700	95.61	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan Dinas	12 unit	12 unit	100%	106.200.000	100.118.700	94.27	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor	10 jenis	10 jenis	100%	37.500.000	36.950.000	98.53	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis inventaris kantor	1 Jenis	1 Jenis	100%	11.425.000	11.250.000	98.47	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
III	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	-	-	-	-	-	-	
1	Peningkatan SDM TIK	Jumlah peserta sertifikasi TIK	-	-	-	-	-	-	Penghapusan kegiatan sehubungan dengan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19
IV	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP : BB	B	BB	100%	24.999.800	19.163.000	76.65	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen semesteran, 1 LAKIP, 4 laporan pengendalian, 12 laporan RFK	2 Dokumen semesteran, 1 LAKIP, 4 laporan pengendalian, 12 laporan RFK	100%	24.999.800	19.163.000	76.65	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKTAOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
V	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi; Cakupan Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika	40% ; 60%	60% ; 70.96%	150%; 118%	14.193.480.800	12.366.634.490	87.13	
1	Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi	Jumlah aplikasi pendukung e-government	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	391.580.000	366.790.481	93.67	Kegiatan selesai dilaksanakan
2	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur jaringan	24 Titik Wifi, 2 Kantor Pemerintah Terhubung FO	24 Titik Wifi, 2 Kantor Pemerintah Terhubung FO	100%	2.739.232.000	2.543.390.234	92.85	Kegiatan selesai dilaksanakan
3	Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City	Jumlah perangkat pendukung Smart City	-	-	100%	149.774.000	129.702.230	86.60	Kegiatan selesai dilaksanakan
4	Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	Jumlah co-Location server OPD	-	-	100%	1.413.956.000	1.303.880.563	92.22	Kegiatan selesai dilaksanakan
5	Penyediaan Layanan Internet	Jumlah layanan akses internet publik dan aparatur pemerintah	4 jenis	4 jenis	86.17%	8.029.840.000	6.626.236.735	82.52	Titik lokasi internet dilaksanakan sesuai kebutuhan dan infrastruktur penyedia
6	Pemeliharaan infrastruktur jaringan	Jumlah jenis infrastruktur jaringan	2 Jenis (LAN dan WAN)	2 Jenis (LAN dan WAN)	100%	791.300.000	783.837.225	99.06	Kegiatan selesai dilaksanakan
7	Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok	Jumlah domain dan subdomain depok.go.id yang terlayani	2 Portal, 1 Domain dan 120 Subdomain	2 Portal, 1 Domain dan 120 Subdomain	100%	339.999.800	285.127.450	83.86	Google maps API tidak ada tagihan karena <i>price 500.000 permaps load free billing</i>

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
8	Pengembangan Data Warehouse	Jumlah cluster data yang terhubung ke data warehouse	1 Cluster Data	1 Cluster Data	100%	337.799.000	327.669.572	97.00	Kegiatan selesai dilaksanakan
VI	Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Aksesibilitas Informasi Publik	75%	75%	100%	4.897.097.300	4.764.683.669	97.30	Kegiatan selesai dilaksanakan
1	Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok	Jumlah media informasi program pembangunan Kota Depok	9 Media Informasi	9 Media Informasi	100%	1.134.327.000	1.118.874.482	98.64	Kegiatan selesai dilaksanakan
2	Layanan Siaran Melalui Media Elektronik	Jumlah publikasi melalui media elektronik	3 Publikasi	3 Publikasi	100%	365.133.800	343.375.781	94.04	Kegiatan selesai dilaksanakan
3	Kemitraan dengan Media Massa	Jumlah publikasi di media massa	989 publikasi	989 publikasi	100%	1.222.230.000	1.221.400.000	99.93	Kegiatan selesai dilaksanakan
4	Layanan M-CAP (Mobile Community Acces Point/ Mobile Internet)	Jumlah lokasi layanan M-CAP di Wilayah Kota Depok	150 kunjungan	150 kunjungan	100%	148.084.800	130.695.299	88.26	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
5	Layanan Informasi Publik	Jumlah berita / informasi	400 berita / informasi per bulan	400 berita / informasi per bulan	100%	796.807.000	767.317.524	96.30	Kegiatan selesai dilaksanakan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKTAOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
6	Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik	Jumlah pengaduan yang terlayani	1000 pengaduan yang terlayani	1000 pengaduan yang terlayani	100%	347.349.000	333.618.907	96.05	Kegiatan selesai dilaksanakan
7	Pelayanan Pengaduan Emergency Call 112	Jumlah layanan	1 layanan	1 layanan	100%	873.665.700	840.920.826	96.25	Kegiatan selesai dilaksanakan
8	Penataan Radio Komunikasi	Jumlah kegiatan forum radio komunikasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	9.500.000	8.480.850	89.27	Kegiatan selesai dilaksanakan
VII	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	100%	100%	645.296.900	614.589.439	95.24	
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	51.999.900	51.999.900	100.00	Kegiatan selesai dilaksanakan
2	Forum Penggiat Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan	-	-	-	-	-	-	Penghapusan kegiatan sehubungan dengan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19
3	Pengembangan Smart City	Jumlah dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	593.297.000	562.589.539	94.82	Kegiatan selesai dilaksanakan
URUSAN STATISTIK									
I	Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektorl	Jumlah Jenis Informasi Statistik yang Dikelola	6 Jenis Statistik	6 Jenis Statistik	100%	946.621.000	943.990.400	99.72	
1	Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka	Jumlah buku dalam angka dan kecamatan dalam angka kota Depok yang dicetak	120 Buku DDA Tahun 2020 dan 550 Buku KCDA Tahun 2020	120 Buku DDA Tahun 2020 dan 550 Buku KCDA Tahun 2020	100%	77.528.000	75.776.400	97.74	Kegiatan selesai dilaksanakan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKTAOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
2	Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kota Depok	Jumlah dokumen	3 Dokumen (Indikator Ekonomi Makro Kecamatan, Analisis Ekonomi Kreatif Kota Depok dan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok)	3 Dokumen (Indikator Ekonomi Makro Kecamatan, Analisis Ekonomi Kreatif Kota Depok dan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok)	100%	254.218.000	253.412.000	99.68	Kegiatan selesai dilaksanakan
3	Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok	Jumlah dokumen	2 Dokumen (Indikator kesejahteraan masyarakat kota depok dan indikator pembangunan kecamatan kota depok)	2 Dokumen (Indikator kesejahteraan masyarakat kota depok dan indikator pembangunan kecamatan kota depok)	100%	272.877.000	272.827.000	99.98	Kegiatan selesai dilaksanakan
4	Penyusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Jumlah dokumen	-	-	-	-	-	-	Penghapusan kegiatan sehubungan dengan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKTAOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
5	Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	177.440.000	177.440.000	100	Kegiatan selesai dilaksanakan
6	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	164.558.000	164.535.000	99.99	Kegiatan selesai dilaksanakan
	URUSAN PERSANDIAN								
I	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Persentase Aplikasi yang di Uji	60%	60%	100%	178.310.000	177.218.600	99.39	
1	Pengelolaan Persandian	Jumlah aplikasi yang diamankan (IT Security Assesment)	7 aplikasi	7 aplikasi	100%	178.310.000	177.218.600	99.39	Kegiatan selesai dilaksanakan
TOTAL ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					99.59	21.690.721.800	19.655.910.621	90.62	

Berdasarkan tabel 3.4 terdapat penghapusan 3 kegiatan yaitu kegiatan peningkatan SDM TIK, Forum Penggiat Teknologi Informasi dan Penyusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat, dan 2 kegiatan yang tidak memiliki target indikator yaitu kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City dan Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery (DRC), hal tersebut dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19. Pada umumnya semua program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Capaian fisik program/kegiatan Diskominfo Kota Depok terlaksana sebesar 99.59%. Sedangkan realisasi keuangan belanja langsung mencapai 90.62%. Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan, alasan tidak diserapnya anggaran dikarenakan adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa serta pencairan anggaran seseuai kebutuhan.

3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B	BB	125	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
						Program : Peningkatan Administrasi Perkantoran	649.791.000	621.312.323	95.62
						1 Penyediaan Alat Tulis Kantor	133.413.000	127.829.600	95.81
						2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.077.000	57.877.500	88.94
						3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.212.000	7.200.000	99.83
						4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.486.000	15.950.000	96.75
						5 Penyediaan Makanan dan Minuman	188.016.000	182.634.600	97.14
						6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	239.587.000	229.820.623	95.92
						Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	155.125.000	148.318.700	95.61
						1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	106.200.000	100.118.700	94.27
						2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	37.500.000	36.950.000	98.53
						3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.425.000	11.250.000	98.47

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-
						1 Peningkatan SDM TIK	-	-	-
						Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan	645.296.900	614.589.439	95.24
						1 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	51.999.900	51.999.900	100.00
						2 Forum Penggiat Teknologi Informasi	-	-	-
						3 Pengembangan Smart City	593.297.000	562.589.539	94.82
						Program : Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.999.800	19.163.000	76.65
						1 Penyusunan pelaporan keuangan dan Capaian Kinerja	24.999.800	19.163.000	76.65
2	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Cakupan Layanan E-Government yang terintegrasi	40%	60%	150	Program : Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	14.193.480.800	12.366.634.490	87.13
		Cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika	60%	70.96%	118%	1 Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi	391.580.000	366.790.481	93.67
						2 Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi	2.739.232.000	2.543.390.234	92.85
						3 Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City	149.774.000	129.702.230	86.60

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						4 Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	1.413.956.000	1.303.880.563	92.22
						5 Penyediaan Layanan Internet	8.029.840.000	6.626.236.735	82.52
						6 Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	791.300.000	783.837.225	99.06
						7 Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok	339.999.800	285.127.450	83.86
						8 Pengembangan Data Warehouse	337.799.000	327.669.572	97.00
3	Meningkatnya layanan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi badan publik	Baik	Baik	100	Program Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.897.097.300	4.764.683.669	97.30
						1 Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok	1.134.327.000	1.118.874.482	98.64
						2 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik	365.133.800	343.375.781	94.04
						3 Kemitraan dengan Media Massa	1.222.230.000	1.221.400.000	99.93
						4 Layanan M-CAP (<i>Mobile Community Acces Point/Mobile Internet</i>)	148.084.800	130.695.299	88.26
						5 Layanan Informasi Publik	796.807.000	767.317.524	96.30
						6 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik	347.349.000	333.618.907	96.05
						7 Pelayanan Pengaduan Emergency Call 112	873.665.700	840.920.826	96.25
						8 Penataan Radio Komunikasi	9.500.000	8.480.850	89.27

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	6 Jenis Statistik	6 Jenis Statistik	100	URUSAN STATISTIK			
						Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	946.621.000	943.990.400	99.72
						1 Penyediaan Buku Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka	77.528.000	75.776.400	97.74
						2 Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kota Depok	254.218.000	253.412.000	99.68
						3 Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok	272.877.000	272.827.000	99.98
						4 Penyusunan Indeks kebahagiaan Masyarakat	-	-	-
						5 Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan	177.440.000	177.440.000	100.00
						6 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	164.558.000	164.535.000	99.99
5	Meningkatnya Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika	Persentase Aplikasi yang di uji	60%	60%	100	URUSAN PERSANDIAN			
						Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	178.310.000	177.218.600	99.39
						1 Pengelolaan Persandian	178.310.000	177.218.600	99.39

3.7. Realisasi Anggaran Per Sasaran

Penyerapan anggaran belanja Diskominfo Kota Depok Tahun 2020 sebesar Rp. 27.045.887.562 atau dengan nilai persentase sebesar 86.33% dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.389.976.941 atau 76.70% dan Belanja Langsung 19.655.910.621 atau 90.62%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-4 yaitu sebesar 99.72% dan yang terendah pada program/kegiatan di sasaran ke-1 yaitu sebesar 95.13%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Per Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B	BB	1.475.212.700	1.403.383.462	95.13
Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Cakupan Layanan E-Government yang terintegrasi	40%	60%	14.193.480.800	12.366.634.490	98.27
	Cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika	60%	70.96%			
Meningkatnya layanan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi badan publik	Baik	Baik	4.897.097.300	4.764.683.669	97.30
Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	6 Jenis Statistik	6 Jenis Statistik	946.621.000	943.990.400	99.72

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika	Persentase Aplikasi yang di uji	60%	60%	178.310.000	177.218.600	99.39

BAB IV

PENUTUP

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan

Pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian guna mencapai visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Capaian indikator sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo, terdapat 1 indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP Diskominfo dengan hasil penilaian mendapat predikat BB di atas target yang ditetapkan yaitu B sehingga capaian kinerja 125%.
2. Capaian indikator sasaran strategis kedua yaitu cakupan layanan e-government yang terintegrasi dengan realisasi 60% di atas target yang ditetapkan yaitu 40% sehingga capaian kinerja 150%, sedangkan indikator sasaran cakupan layanan infrastruktur teknologi informatika dengan realisasi 70.96% di atas target yang ditetapkan yaitu 60% sehingga capaian kinerja 118%.
3. Indikator sasaran strategis ketiga yaitu indeks keterbukaan informasi badan publik telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.
4. Sasaran strategis keempat dan kelima yaitu meningkatnya pengelolaan data statistic dan meningkatnya system keamanan komunikasi dan informatika telah mencapai target yang diharapkan dengan capaian sebesar 100%.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2016-2021. Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama tahun 2020 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2016-2021. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dapat dinyatakan sangat berhasil.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada Tahun 2020 juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 21.690.721.800 (*dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) dan capaian realisasi kinerja keuangan Rp.19.655.910.621 (*sembilan belas milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*) atau sebesar 90.62%. Terhadap berbagai target capaian yang berhasil maupun yang tidak mencapai target capaian yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2020 menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok untuk melaksanakan berbagai langkah kongkrit dalam perbaikan dan penanganan di masa yang akan datang.

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dalam pemenuhan target kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagian besar produk akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terutama dalam urusan statistik memerlukan pelibatan pihak luar. Seringkali hal tersebut menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan.
- b. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19, selain pemotongan anggaran yang menyebabkan tidak tercapainya target, dilakukan juga penjadwalan ulang kegiatan sehingga menghambat proses penyelesaian kegiatan.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok sepanjang tahun 2020, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan dengan lembaga-lembaga vertikal yang ada diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data dan informasi yang terbaru sebagai bahan penyusunan perencanaan di semua bidang/sector di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- b. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.
- c. Penyusunan perencanaan kegiatan dengan lebih cermat dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan pencapaian kinerja dengan memperhatikan kemampuan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang ada serta berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan.

- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.
- e. Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat maupun berbagai perangkat daerah di Kota Depok untuk mensukseskan dan memaksimalkan penggunaan berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- f. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

Demikian LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.